



Inventarisasi Aset, Pertahankan WTP



AM Nasir

PUTUSSIBAU-RK. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya membuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Terbukti tahun 2018, Pemkab Kapuas Hulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kinerja di tahun 2017.

Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menuturkan, opini WTP tersebut meru-

pakan target yang harus dicapai. Meskipun capaian tersebut belum dirasa ada reward-nya. Sebab janji sebelumnya, WTP dapat penambahan anggaran. Tapi sekarang tidak terjadi, malah berkurang. "Namun ini tuntutan pemerintah, seluruh OPD harus tetap bekerja maksimal," ujar Bupati belum lama ini.

Untuk menggapai WTP, Pemkab Kapuas Hulu dihadapkan dengan

masalah aset yang cukup berat. Sebab permasalahan aset yang harus dibenahi kebanyakan dari periode kepemimpinan Bupati sebelum-sebelumnya. "Namun karena komitmen seluruh OPD yang ada, hal tersebut dapat diselesaikan," ujarnya.

Bupati mengingatkan kepada kepala OPD atau pun pegawai aset agar menyelesaikan permasalahan

aset di instansinya masing-masing. Walaupun itu merupakan pekerjaan dari pejabat lama. "Kalau tidak kita yang benahi, mau kapan lagi kita selesaikan. Jadi kita jangan lihat itu pekerjaan kapan, kita harus selesaikan sebagai tanggungjawab jabatan," tegas Bupati.

Kedepan pendataan aset harus lebih tertib dan terinventarisir dengan baik. Manfaatkan pula perkem-

bangun teknologi yang ada.

"Sebagai pejabat, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan Teknologi. Kalau pimpinan OPD butuh dukungan sumber daya manusia, tunjuk saja pejabat teknis yang dapat memaksimalkannya," pesan Nasir.

Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairadi